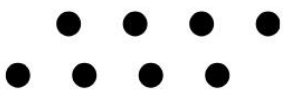


RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
TAHUN 2025 - 2029





KATA PENGANTAR

Puji syukur atas perkenan dan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala keterbatasan dan 2030 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2026-2030. Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan bahan, masukan, dan verifikasi terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen renstra ini.

Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD yang wajib dimiliki, dan memiliki peran penting sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah tertuang dalam RPD tahun 2026-2030. Isi Renstra ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 2030 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta memperhatikan aturan terkait.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) 2026-2030 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun, diharapkan SKPD ini dapat melaksanakan program dan kegiatannya dengan efektif, efisien dan ber sasaran, berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

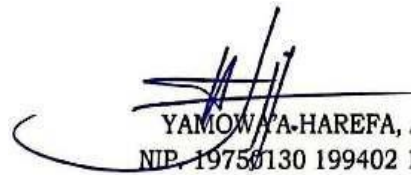


Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Pangkalpinang,

2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**


YAMOWYA-HAREFA, AP.
NIP. 19750130 199402 1 003

DAFTAR ISI



	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	14
GAMBAR PELAYANAN SATPOL PP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya SATPOL PP	24
2.3 Kinerja Pelayanan SATPOL PP	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SATPOL PP	33
BAB III	35
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SATPOL PP	35
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	36
3.3 Tujuan dan Sasaran	37
3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	51



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	58
	4.1 Tujuan dan Sasaran	58
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	180
BAB VIII	PENUTUP	182



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah Anggota Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Status Kepegawaian per Juli 2025	24
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai (PNS) Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Pangkat dan Golongan, serta Jenis Kelamin per Juli 2025	25
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin per Juli 2025	26
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Tingkat Pendidikan per Juli 2025	26
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Juli 2025	28
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah)	30
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Satpol PP	35
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP Terhadap Pencapaian Tujuan Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	41
Tabel 3.3	Analisis Renstra K/L Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan	44
Tabel 3.4	Komparasi Sasaran Renstra Kementerian /Lembaga terhadap Sasaran Renstra Provinsi	47



Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SATPOL PP berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	47
Tabel 3.6	Telaahan terhadap sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	49
Tabel 3.7	Telaahan terhadap sasaran renstra Satpol PP Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50
Tabel 3.8	Identifikasi dan Analisa Kekuatan SATPOL PP	52
Tabel 3.9	Identifikasi dan Analisa Kelemahan SATPOL PP	53
Tabel 3.10	Identifikasi dan Analisa Peluang SATPOL PP	54
Tabel 3.11	Identifikasi dan Analisa Ancaman SATPOL PP	54
Tabel 3.12	Skor Tertimbang Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal SATPOL PP	55
Tabel 3.13	Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman (SWOT)	55
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026-2030	61
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	64
Tabel 6.1	Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan	72
Tabel 6.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan serta Program Wajib Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	110
Tabel 7.1	Indikator Keterkaitan Kinerja SATPOL PP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2026-2030	181



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat provinsi, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Oleh karenanya, setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis PD dengan berpedoman pada RPJMD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1), bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam



rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dalam periode RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026-2030, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022. dan Pelantikan Gubernur terpilih pada Bulan Maret 2025. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga Provinsi Bangka Belitung mengalami kekosongan gubernur sejak 2023- 2025 di Tahun 2022 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2026-2030 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2026-2030, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2026-2030 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2026

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja SATPOL PP akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

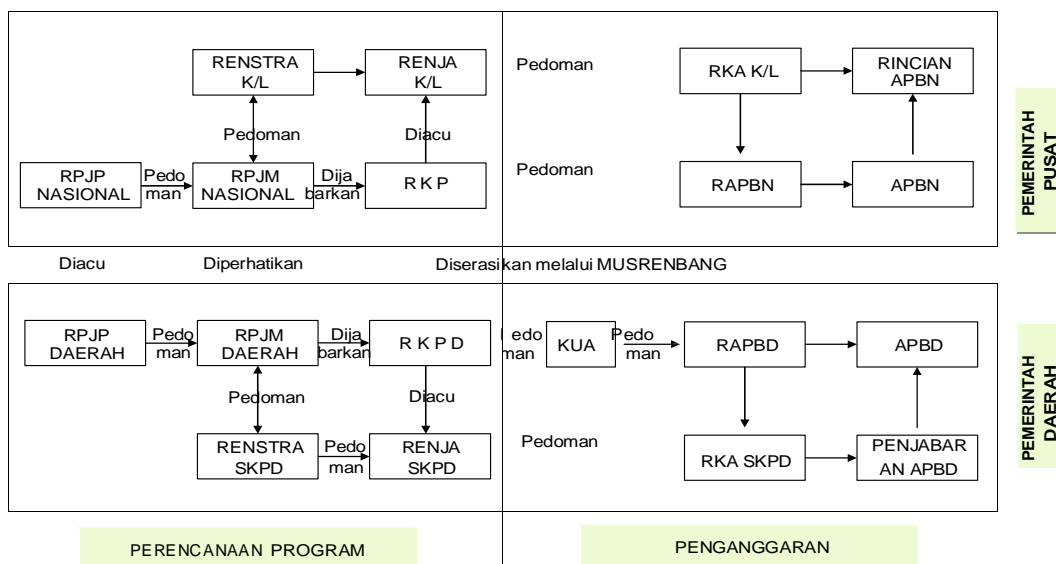


Bappeda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Baik di daerah, antardaerah maupun dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya





Dokumen Renstra PD merupakan dokumen yang sangat strategis dan sangat terkait dengan berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dikeluarkannya Permendagri 90 Tahun 2019, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 adalah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah menjadi acuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya dalam penyusunan struktur organisasi perangkat daerah. Sehingga harapannya perubahan organisasi perangkat daerah, dan dokumen renstra ini selaras dalam upaya peningkatan sistem akuntabilitas pemerintah daerah.



1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 16 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
- 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 2 Seri D);



19 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 5 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 - 2030 adalah untuk:

- a. menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 - 2030 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 - 2030.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) SATPOL PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja SATPOL PP dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
- d. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan



daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

- e. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 - 2030 adalah:

- a. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran SATPOL PP sebagai institusi yang mengatur urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SATPOL PP.
- c. Meningkatkan kualitas penanganan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 - 2030 terdiri dari 8 (delapan) bab dan disusun dalam sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2 Gambaran Pelayanan SATPOLPP.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur SATPOLPP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SATPOLPP, struktur organisasi SATPOLPP, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala SATPOLPP. Uraian tentang struktur organisasi SATPOLPP tersebut ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya SATPOL PP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh SATPOLPP dalam menjalankan



tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SATPOL PP berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan SATPOL PP dan/atau indikator lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SATPOL PP kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SATPOL PP pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SATPOL PP

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan SATPOL PP beserta faktor- faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih



Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SATPOL PP yang terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SATPOL PP, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SATPOL PP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SATPOLPP.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SATPOL PP Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SATPOL PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SATPOL PP kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SATPOL PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SATPOL PP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SATPOL PP ditinjau dari:



1. Gambaran pelayanan SATPOL PP;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SATPOL PP kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SATPOL PP; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SATPOLPP.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SATPOLPP pada tahun rencana.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOLPP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SATPOLPP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SATPOLPP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi.

Bab 8 Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada awalnya Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pada tahun 2008 melalui Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ketika itu eselonering II

b. Namun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana amanat PP itu diharuskan bagi Satuan Polisi Pamong Praja tingkat provinsi eselonering II a, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan perda diatas, Satpol PP Provinsi Kepulauan memiliki tipelogi A.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. Kepala Dinas, yang membawahi:
 1. Sekretariat
 2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Personil Satpol PP



4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Bidang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Umum
 3. Subbag Keuangan
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
 1. Seksi Deteksi Dini
 2. Seksi Penertiban, Operasi dan Pengendalian
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Personil Satpol PP, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
 1. Seksi Satuan perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
 1. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
 2. Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Hubungan Antar Lembaga
- f. Bidang Pencegahan
- g. , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 1. Seksi Pemetaan, Standarisasi Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Pertolongan
 2. Seksi Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta kerjasama antar Daerah Perbatasan
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Fungsional PPNS



1. Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Untuk melaksanakan tugasnya, Kasat Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kerwenangan provinsi;
 - b. Penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan provinsi;
 - c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
 - d. Penyelenggraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sekretariat, mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosi, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsisebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja SATPOL PP ;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP) dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;



- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Satpol PP;
- h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Satpol PP;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dari pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Satpol PP;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Satpol PP;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Satpol PP;
- m. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
- n. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;



- o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - p. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan verifikasi rumusan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan verifikasi bahan kajian fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, deteksi dini, penertiban, dan pemeliharaan;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Penyelenggaraan verifikasi rumusan kebijakan teknis pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan;
 - g. Penyelenggaraan pengoordinasian hubungan kerja fungsional dengan instansi terkait, pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah pusat;
 - h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Personil Satpol PP, mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan



pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan personil satuan polisi pamong praja. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan verifikasi dan perencanaan anggaran, program kerja dan petunjuk teknis operasional dan penyelenggaraan satuan perlindungan masyarakat dan peningkatan kapasitas personil Satpol PP;
- b. Penyelenggaraan verifikasi pendataan, pembinaan, pelatihan dan pemetaan sumber daya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satpol PP;
- c. Penyelenggaraan pengoordinasian pendataan, pembinaan, pelatihan dan pemetaan sumber daya anggota perlindungan masyarakat dan peningkatan kapasitas personil Satpol PP;
- d. Penyelenggaraan pengoordinasian penilaian angka kredit jabatan fungsional polisi pamong praja;
- e. Penyelenggaraan pengoordinasian kajian kebutuhan pengembangan pendidikan/pelatihan teknis dan fungsional Satpol PP;
- f. Penyelenggaraan pengoordinasian sarana dan prasarana bidang perlindungan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada;
- h. Penyelenggaraan pengoordinasian mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- i. Penyelenggaraan pengoordinasian pembinaan teknis operasional dan mobillisasi satuan perlindungan masyarakat/satuan kerja/Lembaga perangkat daerah untuk pelayanan perlindungan



- masyarakat dan penanganan bencana kebakaran dan upaya pertahanan Negara;
- j. Penyelenggaraan pengoordinasian verifikasi pengumpulan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - k. Penyelenggaraan pengoordinasian satuan perlindungan masyarakat dan subbagian unit kerja lain di lingkungan Satuan polisi Pamong Praja;
 - l. Penyelenggaraan pengoordinasian evaluasi kesiapsiagaan dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - m. Penyelenggaraan pengoordinasian mempromosikan pelatihan dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat/satuan kerja/lembaga perangkat daerah untuk pelayanan perlindungan masyarakat;
 - n. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang perlindungan masyarakat dan peningkatan kapasitas personil Satpol PP;
 - o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - p. Penyelenggaraan pembinaan pegawai ASN; dan
 - q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengakkan perauran daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;



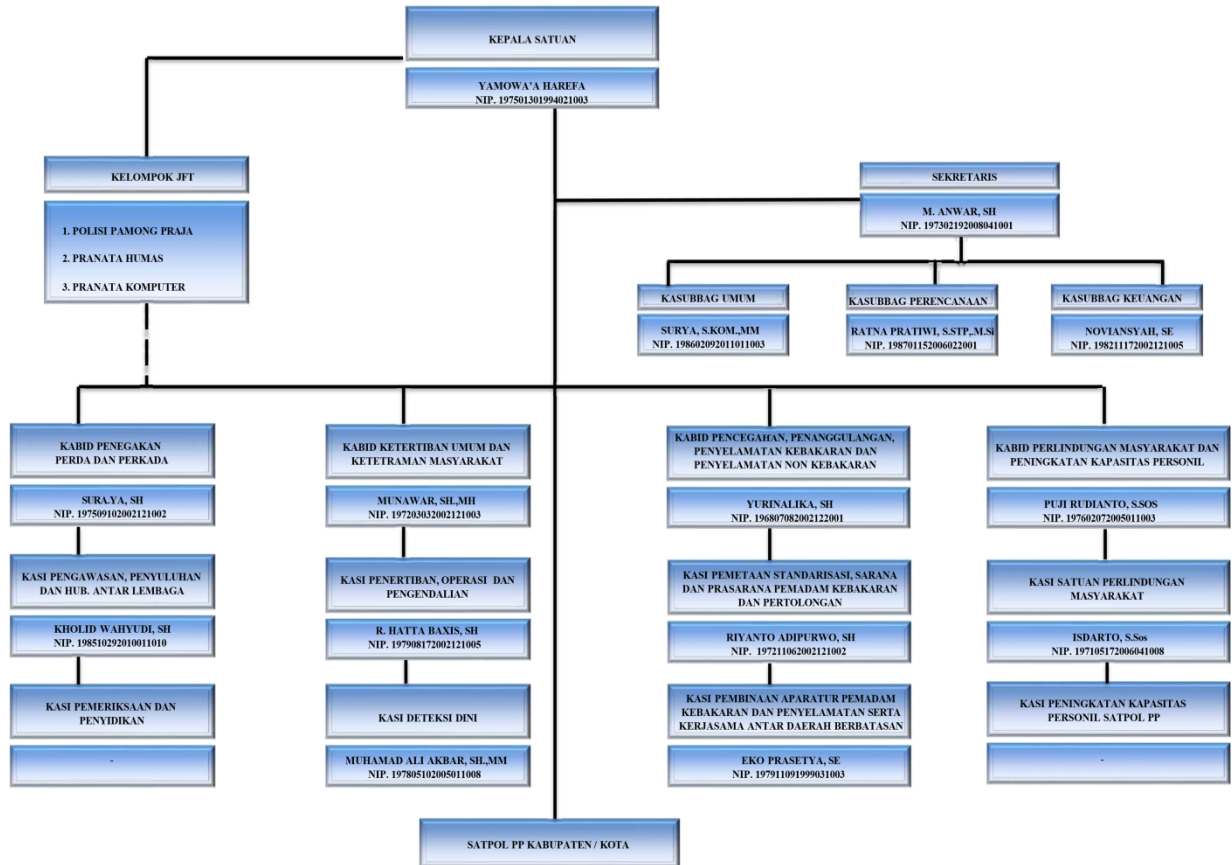
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan penegakan dan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan penyusunan rumusan tugas-tugas pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan hubungan antar lembaga dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap peraturan daerah dan perkara;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan kerja sama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan verifikasi penyiapan bahan kebijakan dan pedoman teknis operasional pemeriksaan dan penyidikan, terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pengendalian penegakan peraturan daerah dan perkara dengan pihak PPNS Kabupaten/Kota/Instansi, satuan polisi pamong praja Kabupaten/Kota, instansi dan institusi terkait;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan perkara;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pembinaan operasional pelaksanaan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan pembinaan PPNS;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasikan evaluasi penyelenggaraan penata kelolaan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- m. Penyelenggaran pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- n. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan



- o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan verifikasi perencanaan anggaran, program kerja dan petunjuk teknis operasional bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemetaan rawan kebakaran;
 - c. Penyelenggaraan verifikasi pendataan dan pembinaan sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
 - e. Penyelenggaraan standarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kabakaran, bencana, serta pertolongan;
 - f. Penyelenggaraan pengoordinasian standarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pencarian, dan pertolongan;
 - g. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaporan data kejadian kebakaran dan penyelamatan;
 - h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG





2.2 Sumber Daya SATPOL PP

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dukung oleh beberapa sumber daya yang ada, diantara sumber daya manusia. Dapat dilihat pada tabel

2.1 jumlah anggota Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2024 sebanyak 226 orang, yang terdiri 74 anggota Satpol PP yang berstatus PNS, dan 146 anggota Satpol PP yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berdasarkan pangkat dan golongan anggota Satpol PP yang PNS, dapat dilihat pada tabel 2.2, pangkat dan golongan tertinggi adalah Pembina Utama Muda/IVd, dan terendah adalah Pengatur Muda Tk I/IIb. Pangkat dan golongan paling banyak adalah Penata Tingkat I/III.d sebanyak 32 orang, dan Penata Muda Tk. I /III.b sebanyak 15 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Anggota Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Status Kepegawaian per Juli 2025

No.	Status kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil (ASN)	74	32,45
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	127	55,70
3	P3K	27	11,84
	Jumlah	228	100

Menurut formasi eselon jabatan struktural, seperti yang ditampilkan pada tabel 2.3, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) jabatan eselon II a yang diduduki oleh Kepala Satuan (Kasat), sekaligus jabatan eselon tertinggi, 1 (satu) jabatan eselon II a, 11 jabatan eselon IV a, dan 64 pejabat atau anggota non eselon, dan dua jabatan eselon empat belum terisi.



Sedangkan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, seperti yang ditampilkan pada tabel 2.5, pendidikan tertinggi yang ditamatkan anggota Satpol PP yang berstatus PNS paling banyak adalah Strata 1 (S1) sebanyak 41 orang dan tamatan SLTA sebanyak 28 orang, dan 5 orang tamatan Strata-2 (S2), dan selebihnya tamatan Diploma III (DIII) sebanyak 2 orang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai (PNS)
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Pangkat Golongan, Serta Jenis Kelamin
Per Juli 2025

Pangkat/Golongan	Status			Jenis Kelamin	
	PNS	CPNS	PPPK	Pria	Wanita
Pembina Utama Madya / IV d	1	0	0	1	0
Pembina Utama Muda / IV c	0	0	0	0	0
Pembina Tk.I / IV b	1	0	0	-	1
Pembina / IV a	5	0	0	4	1
Penata Tk. I / III d	32	0	0	31	1
Penata / III c	3	0	0	3	0
Penata Muda Tk.I / III b	15	0	0	14	1
Penata Muda / III a	8	1	0	8	1
Pengatur Tk.I / II d	6	0	0	6	0
Pengatur / II c	2	0	0	2	0
Pengatur Muda Tk.I / II b	0	0	0	0	0
Pengatur Muda / II a	0	0	0	0	0
Golongan V	0	0	27	18	9
Jumlah	73	1	27	87	14
Total	101			101	



Berdasarkan Jenis Kelamin dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	PPPK	PTK	Jumlah
Pria	68	1	18	100	187
Wanita	5	0	9	16	30
Total	73	1	27	116	217

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin Per Juli 2024

Eselon	Tersedia	Terisi	Belum Terisi
II	1	1	0
III	5	5	0
IV/Sub Koordinator	11	9	2
Jumlah	17	15	2

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai (PNS) Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Tingkat Pendidikan per Juli 2025

Tingkat Pendidikan	Status				Jenis Kelamin	
	PNS	CPNS	PPPK	PTK	Pria	Wanita
S3	0	0	0	0	0	0
S2	5	0	0	0	4	1
S1	44	1	0	20	53	12
D3	4	0	0	4	8	0
SLTA	20	0	27	92	122	17
Jumlah	73	1	27	116	187	30
Total	217				217	



2.1.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Kinerja pelayanan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.5, selain memiliki alat-alat kantor dan rumah tangga seperti komputer, printer, kursi, dan meja, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki alat angkutan seperti sepeda motor, mobil pick up, mobil mini bus, mobil dalmas, alat-alat studio dan komunikasi seperti HT, pesawat telepon, kamera digital, handycam dan lain- lain, kemudian juga memiliki alat-alat kewanaman seperti helm, tameng, dan pakaian PHH.



Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2024

No.	Kelompok dan Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Alat Angkutan	
	- Sepeda Motor	12
	- Mobil Pick Up	4
	- Mobil Mini Bus	4
	- Mobil Pemadam kebakaran	1
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Mobil Dalmas)	2
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Hilux Dbl Cabin)	1
	Jumlah alat angkutan	24
2.	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	
	- Spy Hidden Camera	1
	- Handy Talky (HT)	13
	- Pesawat Telp	1
	- Faximile	2
	- Camera Elektronik (Sony PJ790VE)	1
	- Camera Film (Canon EOS)	2
	- Photo Tustel (Samsung WB350F)	4
	- Microphone/ Wireless Mic (Nexco)	1
	- Peralatan Studio Audio Lainnya (DJI Mavic Air)	1
	- Layar Film/ Proyektor	2
	- Focussing Screen/ Layar LCD Projector	1
	- Wireless Amplifier (Yamaha/BP)	1
	- Antena UHF Stationary (Antena Repeater)	1
	- Peralatan Antena UHF Lainnya (Kabel Repeater Sets)	1
	- Switcher/ Menara Antena Lainnya	1
- Megaphone (TOA)	6	
- CCTV (SPC Real 2 Megapixel/ 1080 Hybrid 4 in 1 AHD)	1	
	Jumlah alat-alat Studio dan Komunikasi	40
3.	Alat-Alat Keamanan	
	- Pistol Gas	5
	- Senjata Gas	50
	- Helm Teknik	16
	- Pentung	62
	- Tongkat Kejut	5
	- Alat Keamanan Lainnya (Pakaian PHH Dalmas)	31
	- Alat Dalmas/ Alat Dakhura Lainnya	129
	- Tenda peleton	4
- Tandu lipat	5	



- Senter	25
- Tonfa	88
- HT	30
- Motor Pengawalan	11
Jumlah alat-alat keamanan	258

2.1.3 Anggaran

Dari sisi anggaran, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi anggaran yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dalam kurun waktu 2020 s.d 2025 beserta realisasinya dengan kondisi sebagai berikut:



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah)

Uraian Belanja	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	S.d.Juni 2025	2022	2023	2024	S.d.Juni 2025	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung (BTL)	11.319.481.503	11.636.343.784	11.558.773.968	12.325.168.765	13.726.638.705		11.230.968.533	11.371.884.875	12.226.444.826	6.625.834.433		96.52%	98.38%	99.20%	48.27%	5,50	4,23
Belanja Langsung (BL)	9.143.819.301	11.296.911.912	13.187.690.896	10.046.860.112	11.951.179.550		9.666.688.302	11.444.450.768	9.120.474.919	3.135.386.302		85.57%	86.78%	90.78%	26.23%	5,78	36,80
Total Anggaran (BTL+BL)	20.463.300	22.933.255.696	24.746.464.864	22.372.028.877	25.677.818.255		20.897.656.835	22.816.335.643	21.346.919.745	9.761.220.735		91.12%	92.20%	95.42%	38.01%	5,27	3,55



2.3 Kinerja Pelayanan SATPOL PP

Renstra ini dibuat Untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dengan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026-2030 untuk mendukung visi dan misi daerah sampai ditetapkannya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, namun demikian yang menjadi catatan bahwa pada periode tersebut Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menetapkan indikator kinerja utama, sasaran kinerja dan target kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan indikator kinerja digunakan untuk Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) yang berkaitan dengan Satpol PP adalah rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk, rasio siskamling per jumlah desa/kelurahan, angka kriminalitas, dan jumlah demonstrasi. Sejalan dengan PP diatas, kinerja pelayanan perangkat daerah ditunjukkan dalam tabel 2.8, dimana dari tabel dimaksud terlihat ada indikator yang tercapai dan belum tercapai pada tahun awal perencanaan renstra, Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program Perangkat Daerah



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program SATPOL PP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Angka kriminalitas	-	-	-	13,00	-	-	-	-	10,41	9,91	9,06	9,91	80,07	-	-	-
2.	Jumlah Satlinmas	-	-	-	-	-	-	-	-	3555	3997	3833	3845	-	-	-	-
3.	Jumlah Anggota Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	1449	1558	1398	1583	-	-	-	-
4.	Jumlah Pos Siskamling	-	-	-	-	-	-	-	-	1194	1276	1218	1132	-	-	-	-
5.	Jumlah Demo	-	-	-	-	-	-	-	-	28	19	21	33	-	-	-	-
6.	Jumlah Pelanggar Perda yang ditindak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22635	693	-	-	-	-
7.	Jumlah Kasus Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	336	-	-	-	-
8.	Jumlah Kasus Kebakaran dalam Waktu 15 Menit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	207	-	-	-	-
9.	Persentase penurunan pelanggaran tibumtranmas	-	-	-	95	90	85	80	75	63	27	-	-	66,31	57,14	-	-
10.	Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Cakupan penegakkan perda	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kanrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran	-	-	-	-	-	-	44,78	55,07	-	-	-	44,78	-	-	-	100
13.	Persentase personil Satpol PP yang berkompeten	-	-	-	-	-	-	83,75	93,33	-	-	-	78,37	-	-	-	93,57



Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kualitas penyelenggara urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator tersebut adalah :

1. Meningkatnya cakupan penegakkan peraturan Daerah
2. Meningkatnya satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran
3. Meningkatnya personil Satpol PP yang berkompeten;
4. Meningkatnya penurunan pelanggaran tibumtranmas
5. Meningkatnya penindakan pelanggaran tibumtranmas

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SATPOL PP

Tantang dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang diperoleh dari analisis pelayanan perangkat daerah dan beberapa Renstra perangkat daerah kabupaten dan kota.

2.4.1 Tantangan

Tantangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Bagaimana menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi tertib dan tentram di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama terkait konflik pertambangan illegal oleh masyarakat di darat dan di laut.
2. Bagaimana upaya membuat masyarakat, orang, badan hukum patuh terhadap perda dan peraturan kepala daerah sesuai kewenangan dan tugas Satpol PP.
3. Bagaimana meningkatkan dan memberdayakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain hal tersebut Satlinmas juga ditugaskan berperan aktif dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pra dan pasca pemilihan umum (Pilpres, Pileg, Pilkada dan Pilkadaes) serta membantu penanggulangan bencana.
4. Bagaimana membangun sinergitas kerjasama antar Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Polri dan TNI;



5. Bagaimana meningkatkan kualitas atau kemampuan anggota satpol pp ditengah-tengah tuntutan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
6. Bagaimana memaksimalkan dan melaksanakan semua tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satpol PP, dan memaksimalkan peran dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
7. Bagaimana meningkatkan respontime 15 menit pemadam kebakaran.

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah:

1. Keberadaan dan semua tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satpol PP dijamin oleh produk hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja. Seluruh perangkat daerah Satpol PP baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki tugas pokok, dan fungsi yang sama, yakni menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat
2. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu SPM, hal ini diatur pada PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM bahwa urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Satpol PP merupakan salah satu SPM. Kemudian di perkuat dengan Permendagri 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota.
3. Terdapat sumber daya yang dimiliki Satpol PP, baik sumber daya manusia dan sumber daya berupa sarana dan prasarana.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SATPOLPP

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SATPOL PP, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh SATPOL PP sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, yaitu:

1. Masih tingginya jumlah pelanggaran perda
2. Tingginya jumlah pelanggaran tibumtranmas
3. Satlinmas belum mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan dalam upaya membantu keamanan, kentruman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana
4. Minimnya sarana dan prasarana gedung kantor Satpol PP
5. Sarana dan Prasarana serta anggaran pemeliharaan Pemadam Kebakaran yang terbatas

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran SATPOL PP

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya jumlah pelanggaran perda	Pemahaman anggota Satpol PP terkait perda dan pemahaman tugas pokok dan fungsi	Masyarakat kurang memahami perda



NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Tingginya jumlah pelanggaran tibumtranmas	Anggaran, jumlah personil, kemampuan personil	Lemahnya koordinasi antar Satpol PP provinsi dengan Satpol PP kab/kota
3	Satlinmas belum mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan dalam upaya membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana	Petunjuk teknis pemberdayaan dan tugas Satlinmas	Masyarakat kurang memahami pelanggaran tibumtran-mas Keinginan masyarakat bertugas sebagai Satlinmas
4	Respon time 15 menit pertolongan kebakaran	Anggaran, jumlah personil, kemampuan personil	Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan biaya pemeliharaan yang terbatas

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Daerah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 dan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026, , serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi tetangga yang berbatasan.



3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Dengan Memperhatikan Tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 pada urusan Trantibumlinmas Mewujudkan birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani. Dengan tujuan renstra PD meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, dan indikatornya meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan penelaahan terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pelayanan SATPOL PP berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung MISI ke 2 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya,

ketercapaian indikator kinerja daerah diarahkan untuk mendukung tujuan **“Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.**

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	ASPEK PELAYANAN UMUM							
27	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	%	70,5	71,38	72,25	73,13	74	74,88



Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	30	33	36	39	42	45

Tabel 4.4.
TARGET Indikator Utama Pembangunan (IUP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	70,5	71,37	72,25	73,12	74	74,87

Adapun tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah

1. Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
2. Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui sasaran :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan	Indeks penyelenggaraan tratibumlinmas	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	penurunan Persentase gangguan trantibum



Perlindungan Masyarakat		Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran
		Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (SATPOLPP)	Nilai Raport Kinerja SATPOLPP

Adapun program pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab SATPOL PP untuk dilaksanakan adalah Program untuk melaksanakan urusan perencanaan dan urusan penelitian, dengan program operasional yang akan dilaksanakan oleh SATPOL PP selama kurun waktu 2026-2030 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SATPOL PP, ada beberapa faktor yang jadi penghambat dan pendorong pelayanan SATPOL PP yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 S.D 2030 tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SATPOL PP.

Adapun beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SATPOL PP yang mempengaruhi pencapaian mendukung MISI ke 2 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu

1. memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya



2. Memperkuat reformasi hukum, antara lain melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi
3. Penerapan meritokrasi dalam Manajemen ASN, melalui Pengembangan pengetahuan dan keterampilan ASN, melalui ASN Corpu

Adapun beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SATPOL PP yang mempengaruhi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 S.D 2030 yang menjadi tanggungjawab SATPOL PP tersebut, antara lain adalah sebagaimana yang disajikan dalam table 3.2 berikut:



Table 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SATPOL PP Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah

Tujuan: “ Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. ”.								
Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan SATPOL PP	Sasaran SATPOL PP	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan SATPOL PP	Faktor-Faktor	
							Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan aspek kebebasan dalam demokras	Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	penegakkan perda	Koordinasi sinergitas antar lembaga yang masih lemah - Dukungan anggaran dan jumlah personil yang belum optimal - Belum optimalnya pemahaman anggota Satpol PP tentang tugas dan fungsi penegakkan perda	- Keinginan untuk menegakan perda dan menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh anggota Satpol PP, dan tersedianya petunjuk teknis berupa produk hukum agar aparat, masyarakat dan badan hukum dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik - Satpol PP terdapat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
						Melaksanakan peran dan tugas	- Jumlah Satlinmas masih sedikit	- Kecuali Kota Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan: “ Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. ”.								
Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan SATPOL PP	Sasaran SATPOL PP	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan SATPOL PP	Faktor-Faktor	
							Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>Satlinmas dalam membantu keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>Melaksanakan peran dan tugas Satlinmas membantu penanggulangan bencana dan kebakaran melakukan sosialisasi pengetahuan masyarakat dalam rangka penanggulangan kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pedoman/petunjuk teknis terkait tata kerja dan pelaporan Satlinmas di lapangan - Minimnya upaya agar satlinmas mendapatkan haknya seperti diamanatkan dalam peraturan - Pemahaman penerapan SPM yang berbeda-beda 	<p>Satlinmas terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub ketertiban umum, bencana dan kebakaran merupakan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)
			Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<p>Melaksanakan peran dan tugas Satlinmas dalam membantu keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>Melaksanakan peran dan tugas Satlinmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Satlinmas masih sedikit - Belum adanya pedoman/petunjuk teknis terkait tata kerja dan pelaporan Satlinmas di lapangan - Minimnya upaya agar satlinmas mendapatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecuali Kota Pangkalpinang terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Sub ketertiban umum, bencana

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan: “ Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. ”.								
Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan SATPOL PP	Sasaran SATPOL PP	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan SATPOL PP	Faktor-Faktor	
							Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						membantu penanggulangan bencana dan kebakaran melakukan sosialisasi pengetahuan masyarakat dalam rangka penanggulangan kebakaran	haknya seperti diamanatkan dalam peraturan Pemahamanpenerapan SPM yang berbeda-beda	dan kebakaran merupakan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)



3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telaahan Renstra K/L dalam telaahan ini merupakan Renstra Kementerian Dalam Negeri republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) yang merupakan penyusun kebijakan teknis urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus pembantu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pembina Satpol PP. Analisis terhadap Renstra K/L Dirjen BAK disajikan dalam tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Analisis Renstra K/L
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
Visi	“Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”	Frase “terwujudnya” menunjukkan peran organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan negara dan sistem birokrasi negara berfungsi dengan baik. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan harus betul-betul dapat memahami dan mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan pemerintah dan birokrasi di negara indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.



Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
		<p>Frase “Pembinaan Administrasi Kewilayahan”, menunjukkan bahwa Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam memantapkan penyelenggaraan tugas – tugas Pembinaan Administrasi Kewilayahan. Frase ”Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintah di daerah yang selalu harus ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini akan berhasil bila ada jejaring internal maupun eksternal dalam kerangka global.</p>
Misi	Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban	Sebagai Pembinaan umum Satpol PP, Menteri Dalam



Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
	umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;	Negeri melalui Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan memfasilitasi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan perda, dan perlindungan masyarakat
Tujuan	Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Dari kalimat tujuan dimaksud, tampak tidak menyinggung Satpol PP secara jelas, namun Urusan Satpol PP merupakan wilayah pemerintahan umum
Program dan Indikator Kinerjanya	Program pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat Indikator Kinerja: peningkatan pembinaan kapasitas dan kelembagaan Satpol PP dan Satuan Perliindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Program Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terkait dengan Satpol PP dimaksud lebih kepada pembinaan dan petunjuk teknis bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Satpol PP terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana tugas, fungsi dan kewenagannya sama dan sudah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2010. Walaupun belum seragam, sasaran strategis dan indikator kinerja seluruh Satpol PP tidak akan jauh dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda serta perlindungan masyarakat.



Tabel 3.4
Komparasi Sasaran Renstra Kementerian /Lembaga
terhadap Sasaran Renstra Provinsi

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi
1.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran
2.	Nilai Raport Perangkat Daerah (Satpol PP)	Meningkatnya Tata Kelola internal Perangkat Daerah Satuan Polisi pamong Praja

Tabel 3.5.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SATPOL PP berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra Kemendagri	Sasaran Renstra SATPOL PP	Faktor-Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraah ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi dan	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Pelaksanaan SPM yang belum tepat dalam proses kegiatan penyediaan layanan terdampak	Sarana dan prasarana yang cukup memadai



Sasaran Renstra Kemendagri	Sasaran Renstra SATPOL PP	Faktor-Faktor	
		Penghambat	Pendorong
kapasitas lembaga demokrasi			
	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Sarana dan prasarana serta pemeliharaan yang kurang memadai	Peugasan pimpinan SDM untuk ikut dalam mengikuti diklat dan sosialisasi Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Belum optimalnya SIPD sebagai salah satu wujud pelayanan terhadap data dan informasi kepada masyarakat	SIPD sedang dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan

3.4.2 Telaahan terhadap Renstra SATPOL PP Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain melakukan penelaahan terhadap Renstra K/L, dalam penyusunan Renstra SATPOL PP, juga dilakukan penelaahan terhadap Renstra Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sama halnya dengan penelaahan terhadap Renstra K/L, penelaahan terhadap Renstra SATPOL PP Kabupaten/Kota juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SATPOL PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SATPOL PP ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra SATPOL PP Kabupaten/Kota.



Uraian dari penelaahan terhadap Renstra SATPOL PP Kab/Kota adalah sebagaimana yang disajikan pada table 3.3 berikut:



Tabel 3.6
Telaahan Terhadap Sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran SATPOL PP Provinsi	Sasaran SATPOL PP Kota Pangkalpinang	Sasaran SATPOL PP Kab. Bangka	Sasaran SATPOL PP Kab. Bangka Tengah	Sasaran SATPOL PP Kab. Bangka Selatan	Sasaran SATPOL PP Kab. Bangka Barat	Sasaran SATPOL PP Kab. Belitung	Sasaran SATPOL PP Kab. Belitung Timur	Faktor-Faktor	
								Penghambat	Pendorong
Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Koordinasi sinergitas antar lembaga yang masih lemah - Dukungan anggaran dan jumlah personil yang belum optimal - Belum optimalnya pemahaman anggota Satpol PP tentang tugas dan fungsi penegakkan perda	- Keinginan untuk menegakan perda dan menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh anggota Satpol PP, dan tersedianya petunjuk teknis berupa produk hukum agar aparat, masyarakat dan badan hukum dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik - Satpol PP terdapat di seluruh wilayah



Sasaran SATPOL PP Provinsi	Sasaran SATPOL PP Kota Pangkalpinang	Sasaran SATPOL PP Kab. Bangka	Sasaran SATPOL PP Kab. Bangka Tengah	Sasaran SATPOL PP Kab. Bangka Selatan	Sasaran SATPOL PP Kab. Bangka Barat	Sasaran SATPOL PP Kab. Belitung	Sasaran SATPOL PP Kab. Belitung Timur	Faktor-Faktor	
								Penghambat	Pendorong
									Provinsi Kep Babel
Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Satlinmas masih sedikit - Belum adanya pedoman/petunjuk teknis terkait tata kerja dan pelaporan Satlinmas di lapangan - Minimnya upaya agar satlinmas mendapatkan haknya seperti diamanatkan dalam peraturan - Pemahaman penerapan SPM yang berbeda-beda 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecuali Kota Pangkalpinang Satlinmas terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Sub ketertiban umum, bencana dan kebakaran merupakan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan persoalan yang dihadapi masyarakat, yang harus direspon oleh pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah. Jika persoalan tersebut tidak direspon atau diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian dan masalah besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil forum diskusi di internal Satpol PP dengan memperhatikan tugas dan fungsi OPD, isu-isu strategis Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang, Tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar; Tahun 2020 sejumlah 941, Tahun 2021, sejumlah 1737, Tahun 2022 sejumlah 749 serta tahun 2023 sejumlah 492 dan Tahun 2024 sejumlah 536.
2. Kondisi kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat digambarkan dengan angka jumlah kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun trendnya menurun, terjadi tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus, Tahun 2020 sejumlah 1320, Tahun 2021, sejumlah 1127, Tahun 2022 sejumlah 1321 serta tahun 2023 sejumlah 1125 dan tahun 2024 berjumlah 222 sejumlah pada Tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan hal ini dikarenakan kerjasama yang baik antara masyarakat dan kepolisian sehingga lingkungan lebih aman dan kondusif.
3. Belum semua Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka , serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2024 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1254 orang, namun baru 820 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2019



telah terjadi 1.565 kasus kebakaran, Tahun 2020 terjadi 403 kasus kebakaran, Tahun 2021 terjadi sebanyak 227 kasus pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 225, Tahun 2023 terjadi sejumlah 1955 kali kasus kebakaran dan hanya 1086 kejadian yang bisa dikategorikan sebagai kebakaran yang dilayani dalam waktu tanggap 15 menit (respon time), pada tahun 2024 terjadi kebakaran sejumlah 495 dan hanya 295 yang bisa dikategorikan dalam waktu tanggap 15 menit (respon time) hal tersebut disebabkan karena sarana dan prasarana yang tidak mendukung Standar Pelayanan Minimal sehingga sampai Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran harus dilakukan pengembangan terhadap kapasitas dan kompetensi pemadam kebakaran

Tabel 3.8
Identifikasi dan Analisa Kekuatan SATPOL PP

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja	20	4	0,94
2	Adanya kemauan dan komitmen jajaran Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas	15	3	0,52
3	Keberadaan perda dan perkara sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda	20	4	0,94
4	Keberadaan PPNS di Satpol PP dan OPD	30	4	1,41
TOTAL		85		3,81

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel 3.9



Identifikasi dan Analisa Kelemahan SATPOL PP

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kualitas dan kuantitas)	20	4	0,94
2	Belum semua anggota Satpol PP memahami teknis operasional satpol pp dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda	20	3	0,70
3	Belum semua satlinmas mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan tibumtranmas, penanganan bencana dan kebakaran	20	3	0,70
4	Minimnya penyidikan kasus oleh Satpol PP yang sampai di pengadilan	25	4	1,17
TOTAL		85		2,91

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel 3.10
Identifikasi dan Analisa Peluang SATPOL PP

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Kebutuhan masyarakat akan kondisi hidup yang tertib, tentram, aman dan terlindungi dari bencana	15	4	0,92



No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
2	Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tugas Satpol PP	20	4	1,23
3	Peraturan yang mengamankan Satpol PP dapat bekerjasama dan penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI	30	5	2,30
	TOTAL	65		4,45

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel 3.11
Identifikasi dan Analisa Ancaman SATPOL PP

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan daerah	25	5	1,47
2	Tuntutan terhadap pelayanan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda/perkada	20	4	0,94
3	Luasnya cakupan wilayah/wilayah kepulauan	20	4	0,94
4	Kebebasan berpendapat, yang menjamin masyarakat untuk menyuarakan pendapat melalui demonstrasi/unjuk rasa	20	4	0,94
	TOTAL	85		4,29

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar



Tabel 3.12
Skor Tertimbang Analisa Lingkungan
Internal dan Eksternal SATPOL PP

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
Kekuatan	3,81	Peluang	4,45
Kelemahan	2,91	Ancaman	4,29
KESEIMBANGAN	0,9	KESEIMBANGAN	0,16

Tabel 3.13
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman (SWOT)

<u>Internal dan Eksternal</u>	<u>KEKUATAN (S)</u>	<u>KELEMAHAN (W)</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja 2. Adanya kemauan dan komitmen jajaran Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas 3. Keberadaan perda dan perkara sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda 4. Keberadaan PPNS di Satpol PP dan OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kualitas dan kuantitas) 2. Belum semua anggota Satpol PP memahami teknis operasional satpol pp dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda 3. Belum semua satlinmas mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan tibumtranmas, penanganan bencana dan kebakaran 4. Minimnya penyidikan kasus oleh Satpol PP yang sampai di pengadilan
<u>PELUANG (O)</u>	<u>Strategi (S-O)</u>	<u>Strategi (W-O)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan masyarakat akan kondisi hidup yang tertib, tentram, aman dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1



<p>terlindungi dari bencana</p> <p>2. Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tugas Satpol PP</p> <p>3. Peraturan yang mengamanatkan Satpol PP dapat bekerjasama dan penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI</p>	<p>provinsi, melalui kebijakan:</p> <p>a) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara, melalui pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar perda/perkada;</p> <p>b) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi;</p> <p>c) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pelatihan bagi anggota satlinmas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran;</p> <p>d) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum, melalui pengadaan sapsas yang dibutuhkan dalam</p>	<p>(satu) daerah provinsi, melalui kebijakan:</p> <p>a) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pelatihan bagi anggota satlinmas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran,</p> <p>b) Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia, melalui pelaksanaan pelatihan dan pengiriman peserta peningkatan kapasitas anggota satpol pp;</p> <p>c) Pembinaan jabatan fungsional satuan polisi pamong praja;</p> <p>2. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran</p>
--	---	---



	menjalankan kewenangan dan tugas;	
<u>ANCAMAN (T)</u>	Strategi (S-A)	Strategi (W-A)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat, aparat dan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan daerah 2. Tuntutan terhadap pelayanan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda/perkada 3. Luasnya cakupan wilayah/ wilayah kepulauan 4. Kebebasan berpendapat, yang menjamin masyarakat untuk menyuarakan pendapat melalui demonstrasi/ unjuk rasa 	<p>Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur</p>	<p>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p>



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja 2023-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026. Pada Bab V, dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026. SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung untuk pencapaian tujuan “Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi”. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, diintervensi dengan sasaran “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan” yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
- Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Untuk itu, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh SATPOL PP adalah:

1. meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat yang akan diwujudkan melalui sasaran:



1. Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
2. Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (SATPOL PP)
3. Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah SATPOL PP

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebihbaik, serta menjadi arah kebijakan SATPOL PP Berdasarkan pejelasan atas keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPD di atas dengan tugas dan fungsi pelayanan SATPOL PP serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka tujuan pembangunan jangka menengah SATPOL PP yang ingin diwujudkan pada tahun 2026 adalah: “Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Tujuan ini dirumuskan, erat kaitannya dengan dukungan SATPOL PP dalam mencapai indikator sasaran penurunan gangguan trantibum.

Untuk mengukur ketercapaian dari tujuan SATPOL PP pada akhir periode Renstra SATPOL PP tersebut, dapat diukur melalui indikator tujuan yaitu, Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip Provinsi dan predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP

Untuk menerjemahkan keberhasilan capaian tujuan pembangunan jangka menengah di atas secara tahunan, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
2. Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran
3. Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)



Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang dimulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah, sinkronisasi dan sinergisitas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kaitan substantif dengan visi dan misi RPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Renstra Kementerian/ Lembaga Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga hubungan RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat Daerah.

Program-program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana dijabarkan pada lampiran renstra ini.

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026-2030

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja sasaran				
					2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	6,00	6,5	6,7	6,8	7,0
			Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	4,80	4,70	4,65	4,60	4,55
2.		Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya nilai raport kinerja perangkat daerah	Nilai Raport Kinerja Perangkat Daerah	50	63	67	70	70



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja SATPOL PP. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, SATPOL PP harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparat maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.



Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan SATPOL PP untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel V.1 berikut



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD 2023-2026 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel					
Sasaran RPJMD 2023-2026: Mewujudkan birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Indeks penyelenggaraan trtantibumlinmas	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Penegakan perda dan perkada Provinsi Kep. Bangka Belitung
				Peningkatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
				Peningkatan perlindungan terhadap masyarakat	Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat



Tujuan RPD 2023-2026 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel					
Sasaran RPJMD 2023-2026: Mewujudkan birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Peningkatan kapasitas SDM PPNS	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Indeks penyelenggaraan trtantibumlinmas	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan layanan pencegahan kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran
				Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran



Tujuan RPD 2023-2026 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel					
Sasaran RPJMD 2023-2026: Mewujudkan birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)	Nilai Raport Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah
					Peningkatan kualitas pelayanan Perangkat Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Secara harfiah, definisi dari program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2023-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :
 - Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini adalah:

- a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, melalui kegiatan:
 - 1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, dengan indikator kegiatan:



- Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan
 - Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan Tibumtranmas
 - Jumlah anggota Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya
 - Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten
- 2) kegiatan Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, dengan indikator kegiatan :
- Jumlah sosialisasi Perda dan Pergub terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha
 - Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan pergub
- 3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan indikator kegiatan :
- Jumlah Satpol PP dan ASN OPD yang memiliki kualitas sebagai PPNS
 - Jumlah penyidikan terhadap pelanggar perda dan pergub
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :
Menurunkan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran.
- Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:
- a. Persentase response time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
- 1) Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran, dengan indikator kegiatan:
- Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran
 - Jumlah sarana pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia



- Jumlah dokumen standarisasi sapsras pemadam kebakaran dan pertolongan
 - Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan
- 2) kegiatan Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, dengan indiktaor kegiatan :
- Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelematan non kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsidengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :
- Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah
- Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:
- a. Nilai Sakip Perangkat Daerah, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Survey Kepuasan Pelayanan Internal, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan.
 - 2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah BMD yang Teradminitrasi Sesuai dengan Peraturan.
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian.



- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara.

Program dan kegiatan di atas, dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target dari sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD 2026 - 2030

Guna menjamin program dan kegiatan beserta indikatornya sudah dirumuskan secara tepat, maka perlu dilakukan penelaahan terhadap konsistensi keterkaitannya dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, sasaran program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan yang telah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Rencana program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dan ditetapkan untuk mengakomodir dan menjawab berbagai



tantangan, persoalan dan kondisi kekinian sekaligus menciptakan peluang positif dalam empat tahun ke depan (2023-2026) dengan rencana program/kegiatan prioritas dan indikator kinerja serta rencana pendanaan indikatif sebagaimana terinci pada lampiran rencana strategis ini. Berikut Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2 dibawah ini.



Tabel 6.1.
Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (SATPOL PP)	Predikat RB Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)	Nilai Raport Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SATPOL PP	Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan di SATPOL PP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Meningkatkan ketaatan dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan SATPOL PP						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Pemenuhan secara bertahap kebutuhan SATPOL PP terhadap akses dan fasilitas pendukung kerja	Meningkatkan ketaatan dan kualitas pelaporan keuangan SATPOL PP		Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal				
					Meningkatkan disiplin aparatur SATPOL PP				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Meningkatkan kapasitas SDM SATPOL PP						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran SATPOL PP						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang						Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang Teradministrasi Sesuai dengan Peraturan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
											Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
											Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
											Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
											Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
											Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												yang Disediakan
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
											Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
										Jumlah BMN Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Jumlah BMN Penunjang Urusan Pemerintahaja n Daerah Yang Diperlihara	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
										Jumlah BMN Penunjang Urusan Pemerintahaja n Daerah Yang Diperlihara	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Penindakan gangguan trantibum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan
				Pelatihan dan penguahan anggota Satlinmas Provinsi Kep. Babel	Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam rangka membantu					Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan	Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					tibumtrans	perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan
				Peningkatan penengakan perda/perkada yang mengandung sanksi	Penegakan perda dan perkada Provinsi Kep. Bangka Belitung					Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi
				Peningkatan kompetensi personil satpol pp dibuktikan dengan	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP					Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten	Sub Kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				sertifikasi sesuai dengan jabatannya							dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
											Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa HAM	Pamongpraja Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia
											Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan
											Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											perda dan perkara	perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan
									Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar			



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
										Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada
										Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											, dan Pengawasan	
										Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal
										Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan	Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten/ Kota	Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibumtranmas	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa yang Dilakukan Penindakan
								Persentase cakupan perlindungan masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu)	Meningkatnya kapasitas SDM, PPNS, Pol PP, Linmas	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Daerah Provinsi			melalui SK Gubernur
										Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas
										Terlaksananya Peningkatan Meningkatkan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan pergub	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Daerah Sesuai SOP		Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								Jumlah Sosialisasi Perda dan Pergub terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada
								Jumlah polpp dan ASN OPD yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS
										Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah					Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah penyidikan terhadap pelanggar perda dan pergub		
										Terbentuknya Sekretariat PPNS	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS
										Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Jumlah penyidikan terhadap pelanggar perda dan pergub		
										Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
									Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah sosialisasi perda dan pergUb terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur
										Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan pergub	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan pergub	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda dan Pergub
									Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah pol pp dan ASN OPD yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Pelatihan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												Pencegahan dan Mitigasi Bencana
										Jumlah penyidikan terhadap pelanggar perda dan pergub	Sub Kegiatan Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyidikan atas pelanggar perda, jumlah perkara yang dapat disidangkan di tempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP secara operasional sudah aktif



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase penurunan Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatkan respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Penyelenggaraan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	kegiatan Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	Sub Kegiatan Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Jumlah dokumen informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal
										Jumlah spras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia	Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kab/Kota diri	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, penyelamatan non kebakarannya	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Jumlah dokumen standarisasi sapsras pemadam kebakaran dan pertolongan	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait
										Jumlah dokumen kerjasama antar daerah/antar lembaga	Sub Kegiatan Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah dokumen periodik penyekenggaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												diri secara berkala, sah dan legal
											Sub Kegiatan Bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		
										Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
										Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/ Kota	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/ Kota



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Permutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal
										Tersedianya Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	dan Penyelamatan
										Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota)



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran
										Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota
										Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota
										Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	n Non Kebakaran	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
										Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan kompetensi
										Tersedianya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										kebakaran provinsi dan kabupaten/kota		
									kegiatan Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Sub Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
										Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
										Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/ Kota	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/ Kota
										Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/ Kota	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/ Kota



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait
										Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/ Kota

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
										Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pegawai penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran
										Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/ Kota



Berdasarkan tabel 6.1 diatas, dapat dipastikan bahwa dimulai dari tujuan sampai dengan indikator kegiatan saling terkait. Artinya, keberhasilan pencapaian tujuan pelayanan SATPOL PP yaitu meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan akan dapat tercapai pada akhir periode Renstra apabila secara konsisten kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, sebagai bentuk operasional program dan kegiatan, perlu ditetapkan target dari indikator kinerja tujuan pada akhir periode Renstra dan indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya serta kebutuhan pendanaan indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya.

Hal tersebut, sebagaimana yang disajikan pada tabel 6.2 berikut:



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					23.068.249.756,00		28.317.353.526,00		31.609.719.717,00		28.906.471.398,00		29.207.674.356,00
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.629.249.255,00		16.896.823.746,00		17.991.584.068,00		16.941.027.023,00		17.342.286.523,00
	Meningkatkan Akutabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,9	79,25	240.000.000,00	79,50	266.500.000,00	79,75	260.405.000,00	79,80	265.000.000,00	79,85	246.500.000,00
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					240.000.000,00		266.500.000,00		260.405.000,00		265.000.000,00		246.500.000,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Dokumen	5	240.000.000,00	5	266.500.000,00	5	260.405.000,00	5	265.000.000,00	5	246.500.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	30		30		30		30			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	7		7		7		7			
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					80.000.000,00		90.000.000,00		86.800.000,00		89.000.000,00		83.000.000,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	7	80.000.000,00	7	90.000.000,00	7	86.800.000,00	7	89.000.000,00	7	83.000.000,00
1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					80.000.000,00		90.000.000,00		86.800.000,00		88.000.000,00		82.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	30	80.000.000,00	30	90.000.000,00	30	86.800.000,00	30	88.000.000,00	30	82.000.000,00
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					80.000.000,00		86.500.000,00		86.805.000,00		88.000.000,00		81.500.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	5	80.000.000,00	5	86.500.000,00	5	86.805.000,00	5	88.000.000,00	5	81.500.000,00
	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Angka)	Angka	70,70	15.389.249.255,00	75,80	16.630.323.746,00	75,85	17.731.179.068,00	75,90	16.676.027.023,00	75,95	17.095.786.523,00
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.048.000.000,00		14.067.077.928,00		14.222.140.223,00		14.184.263.023,00		14.473.133.435,00
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	4	14.048.000.000,00	4	14.067.077.928,00	4	14.222.140.223,00	4	14.184.263.023,00	4	14.473.133.435,00
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Dokumen	4		4		4		4			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	100		100		100		100			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/Bulan	78		78		78		78			
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.000.000.000,00		13.989.716.486,00		14.113.485.255,00		14.116.263.023,00		14.398.147.300,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Orang/ Bulan	78	14.000.000.000,00	78	13.989.716.486,00	78	14.113.485.255,00	78	14.116.263.023,00	78	14.398.147.300,00
1.05.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					8.000.000,00		15.787.147,00		27.551.656,00		14.000.000,00		16.662.045,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	4	8.000.000,00	4	15.787.147,00	4	27.551.656,00	4	14.000.000,00	4	16.662.045,00
1.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0,00		15.787.147,00		26.551.656,00		14.000.000,00		16.662.045,00
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Dokumen	4	0,00	4	15.787.147,00	4	26.551.656,00	4	14.000.000,00	4	16.662.045,00
1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					40.000.000,00		45.787.148,00		54.551.656,00		40.000.000,00		41.662.045,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	100	40.000.000,00	100	45.787.148,00	100	54.551.656,00	100	40.000.000,00	100	41.662.045,00
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					90.000.000,00		304.168.652,00		253.456.967,00		205.000.000,00		121.662.045,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	5	90.000.000,00	5	304.168.652,00	5	253.456.967,00	5	205.000.000,00	5	121.662.045,00
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket										
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		202.084.326,00		181.629.483,00		150.000.000,00		60.000.000,00
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket		0,00		202.084.326,00		181.629.483,00		150.000.000,00		60.000.000,00
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					90.000.000,00		102.084.326,00		71.827.484,00		55.000.000,00		61.662.045,00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	5	90.000.000,00	5	102.084.326,00	5	71.827.484,00	5	55.000.000,00	5	61.662.045,00
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					179.000.000,00		419.168.652,00		349.852.973,00		347.000.000,00		361.296.360,00
	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12	179.000.000,00	12	419.168.652,00	12	349.852.973,00	12	347.000.000,00	12	361.296.360,00
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	12		12		12		12		12	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	4		4		4		4		4	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	7		7		7		7		7	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Paket	6		6		6		6		6	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	5		5		5		5		5	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	7		7		7		7		7	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4		4		4		4		4	
1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					14.000.000,00		27.021.081,00		19.456.871,00		19.000.000,00		20.662.045,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	7	14.000.000,00	7	27.021.081,00	7	19.456.871,00	7	19.000.000,00	7	20.662.045,00
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00		33.021.081,00		25.654.871,00		25.000.000,00		26.662.045,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	4	0,00	4	33.021.081,00	4	25.654.871,00	4	25.000.000,00	4	26.662.045,00
1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					16.000.000,00		30.021.081,00		23.456.871,00		24.000.000,00		26.662.045,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	7	16.000.000,00	7	30.021.081,00	7	23.456.871,00	7	24.000.000,00	7	26.662.045,00
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					14.000.000,00		37.021.081,00		19.456.876,00		19.000.000,00		20.662.045,00
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	5	14.000.000,00	5	37.021.081,00	5	19.456.876,00	5	19.000.000,00	5	20.662.045,00
1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					0,00		18.021.081,00		10.456.871,00		10.000.000,00		11.662.045,00
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	4	0,00	4	18.021.081,00	4	10.456.871,00	4	10.000.000,00	4	11.662.045,00
1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material					50.000.000,00		83.021.081,00		75.456.871,00		75.000.000,00		76.662.045,00
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Paket	6	50.000.000,00	6	83.021.081,00	6	75.456.871,00	6	75.000.000,00	6	76.662.045,00
1.05.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					0,00		28.021.085,00		20.456.871,00		20.000.000,00		21.662.045,00
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	12	0,00	12	28.021.085,00	12	20.456.871,00	12	20.000.000,00	12	21.662.045,00
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					85.000.000,00		163.021.081,00		155.456.871,00		155.000.000,00		156.662.045,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12	85.000.000,00	12	163.021.081,00	12	155.456.871,00	12	155.000.000,00	12	156.662.045,00
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					137.485.255,00		584.168.654,00		1.753.654.969,00		865.000.000,00		1.043.713.538,00
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	0	137.485.255,00	1	584.168.654,00	0	1.753.654.969,00	1	865.000.000,00	1	1.043.713.538,00
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	0		0		0		0			
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Unit	0		4		4		4			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	2		2		2		2			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1		1		1		1			
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		50.833.730,00		18.730.996,00		65.000.000,00		20.000.000,00
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0,00	4	50.833.730,00	4	18.730.996,00	4	65.000.000,00	4	20.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		20.833.732,00		32.000.000,00		300.000.000,00		258.727.403,00
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0,00	0	20.833.732,00	0	32.000.000,00	0	300.000.000,00	0	258.727.403,00
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					97.485.254,00		170.833.730,00		150.974.658,00		150.000.000,00		171.662.045,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	2	97.485.254,00	2	170.833.730,00	2	150.974.658,00	2	150.000.000,00	2	171.662.045,00
1.05.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1,00		120.833.732,00		1.350.974.658,00		250.000.000,00		371.662.045,00
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	0	1,00	1	120.833.732,00	0	1.350.974.658,00	1	250.000.000,00	1	371.662.045,00
1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					40.000.000,00		220.833.730,00		200.974.657,00		100.000.000,00		221.662.045,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	40.000.000,00	1	220.833.730,00	1	200.974.657,00	1	100.000.000,00	1	221.662.045,00
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					604.764.000,00		738.932.652,00		668.418.968,00		634.764.000,00		638.088.090,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	0	604.764.000,00	1	738.932.652,00	1	668.418.968,00		634.764.000,00		638.088.090,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	13		13		13		13		13	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12		12		12		12		12	
1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0		0		0		0		0
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan		0		0		0		0		0
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					150.000.000,00		184.722.884,00		164.551.656,00		150.000.000,00		151.662.045,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	150.000.000,00	12	184.722.884,00	12	164.551.656,00	12	150.000.000,00	12	151.662.045,00
1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00		44.722.884,00		14.551.656,00		10.000.000,00		11.662.045,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)										
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	0	0,00	1	44.722.884,00	1	14.551.656,00		10.000.000,00		11.662.045,00
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					454.764.000,00		509.486.884,00		489.315.656,00		474.764.000,00		474.764.000,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	13	454.764.000,00	13	509.486.884,00	13	489.315.656,00	13	474.764.000,00	13	474.764.000,00
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					330.000.000,00		516.807.208,00		483.654.968,00		440.000.000,00		457.893.055,00
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	12	330.000.000,00	12	516.807.208,00	12	483.654.968,00	12	440.000.000,00	12	457.893.055,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	6		6		6		6			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	10		10		10		10			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	10		10		10		10			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	10		10		10		10		10	
1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					270.000.000,00		290.833.730,00		278.730.996,00		270.000.000,00		271.662.045,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	12	270.000.000,00	12	290.833.730,00	12	278.730.996,00	12	270.000.000,00	12	271.662.045,00
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		70.833.730,00		58.730.993,00		50.000.000,00		51.662.045,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	6	0,00	6	70.833.730,00	6	58.730.993,00	6	50.000.000,00	6	51.662.045,00
1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.000.000,00		60.833.730,00		48.730.993,00		40.000.000,00		41.662.045,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	10	40.000.000,00	10	60.833.730,00	10	48.730.993,00	10	40.000.000,00	10	41.662.045,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000,00		47.153.009,00		48.730.993,00		40.000.000,00		41.662.045,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	10	20.000.000,00	10	47.153.009,00	10	48.730.993,00	10	40.000.000,00	10	41.662.045,00
1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		47.153.009,00		48.730.993,00		40.000.000,00		51.244.875,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	10	0,00	10	47.153.009,00	10	48.730.993,00	10	40.000.000,00	10	51.244.875,00
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.811.000.501,00		9.671.686.520,00		10.866.032.732,00		10.282.744.976,00		10.175.156.557,00
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS, POLPP, LINMAS	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)		36,52	95.000.000,00	36,80	767.921.630,00	37,20	1.054.008.183,00	37,50	816.777.768,00	37,80	819.309.643,00
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		36,52		36,80		37,20		37,50		37,80	
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					6.486.000.501,00		8.853.764.890,00		9.762.024.549,00		8.998.045.578,00		9.256.540.919,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Orang	120	95.000.000,00	120	767.921.630,00	120	1.054.008.183,00	120	816.777.768,00	120	819.309.643,00
		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Dokumen	1		1		1		1		1	
		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	0		70		70		70		70	
1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi					0,00		199.307.210,00		345.405.714,00		231.172.837,00		191.436.547,00
	Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Dokumen	1	0,00	1	199.307.210,00	1	345.405.714,00	1	231.172.837,00	1	191.436.547,00
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					95.000.000,00		369.307.210,00		444.669.396,00		353.432.093,00		436.436.547,00
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Orang	120	95.000.000,00	120	369.307.210,00	120	444.669.396,00	120	353.432.093,00	120	436.436.547,00
1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat					0,00		199.307.210,00		263.933.073,00		232.172.838,00		191.436.549,00
	Terlaksananya Peningkatan Meningkatkan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	0	0,00	70	199.307.210,00	70	263.933.073,00	70	232.172.838,00	70	191.436.549,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	Persentase	49,11	325.000.000,00	49,40	817.921.630,00	49,60	1.104.008.183,00	49,80	1.284.699.398,00	50,00	918.615.638,00
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	Persentase	49,11		49,40		49,60		49,80		50,00	
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					245.000.000,00		547.921.622,00		834.008.183,00		908.379.549,00		650.000.000,00
	Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan pergub	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	Laporan	1	195.000.000,00	1	392.545.141,00	1	677.205.729,00	1	665.139.672,00	1	473.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	Unit	1		2		1		1		1	
		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	Laporan	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Laporan	0		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	Dokumen	1		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	Dokumen	4		5		5		4		4	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	Laporan	1		1		1		1		1	
1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					120.000.000,00		21.792.163,00		18.600.821,00		71.659.918,00		27.000.000,00
	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	Laporan	1	120.000.000,00	1	21.792.163,00	1	18.600.821,00	1	71.659.918,00	1	27.000.000,00
1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					0,00		31.792.163,00		31.600.818,00		56.579.959,00		30.000.000,00
	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Laporan	0	0,00	1	31.792.163,00	1	31.600.818,00	1	56.579.959,00	1	30.000.000,00
1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah					0,00		66.792.163,00		83.600.818,00		120.079.959,00		100.000.000,00
	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	Laporan	1	0,00	1	66.792.163,00	1	83.600.818,00	1	120.079.959,00	1	100.000.000,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah					75.000.000,00		76.792.163,00		76.600.818,00		101.579.959,00		75.000.000,00
	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	Dokumen	1	75.000.000,00	1	76.792.163,00	1	76.600.818,00	1	101.579.959,00	1	75.000.000,00
1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum					0,00		71.921.630,00		73.600.818,00		105.079.959,00		82.000.000,00
	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	Dokumen	4	0,00	5	71.921.630,00	5	73.600.818,00	4	105.079.959,00	4	82.000.000,00
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0,00		61.792.163,00		79.600.818,00		120.079.959,00		92.000.000,00
	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	Laporan	1	0,00	1	61.792.163,00	1	79.600.818,00	1	120.079.959,00	1	92.000.000,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum					0,00		61.662.696,00		313.600.818,00		90.079.959,00		67.000.000,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	Unit	1	0,00	2	61.662.696,00	1	313.600.818,00	1	90.079.959,00	1	67.000.000,00
	Jumlah sosialisasi perda dan pergUb terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	Dokumen	0	50.000.000,00	1	155.376.481,00	1	156.802.454,00	1	243.239.877,00	1	177.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	Laporan	1		1		1		1			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Laporan	0		1		1		1			
1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					0,00		41.791.500,00		41.400.818,00		66.579.959,00		40.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Laporan	0	0,00	1	41.791.500,00	1	41.400.818,00	1	66.579.959,00	1	40.000.000,00
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					50.000.000,00		71.792.818,00		73.800.818,00		110.079.959,00		97.000.000,00
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	Laporan	1	50.000.000,00	1	71.792.818,00	1	73.800.818,00	1	110.079.959,00	1	97.000.000,00
1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada					0,00		41.792.163,00		41.600.818,00		66.579.959,00		40.000.000,00
	Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	1	41.792.163,00	1	41.600.818,00	1	66.579.959,00	1	40.000.000,00
1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					80.000.000,00		270.000.008,00		270.000.000,00		376.319.849,00		268.615.638,00
	Jumlah pol pp dan ASN OPD yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	Dokumen	1	80.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	299.739.890,00	1	218.615.638,00
		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	Laporan	1		1		1		1			

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	Laporan	0		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	Laporan	1		1		1		1		1	
1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		76.579.972,00		28.615.638,00
	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	Dokumen	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	76.579.972,00	1	28.615.638,00
1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		76.579.959,00		50.000.000,00
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	Laporan	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	76.579.959,00	1	50.000.000,00
1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum					80.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		96.579.959,00		90.000.000,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	Laporan	1	80.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	96.579.959,00	1	90.000.000,00
1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	Laporan	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
	Jumlah penyidikan terhadap pelanggar perda dan pergub	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	Dokumen		0,00	1	50.000.008,00	1	50.000.000,00	1	76.579.959,00	1	50.000.000,00
1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah					0,00		50.000.008,00		50.000.000,00		76.579.959,00		50.000.000,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	Dokumen		0,00	1	50.000.008,00	1	50.000.000,00	1	76.579.959,00	1	50.000.000,00
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Persentase	40,97	6.241.000.501,00	41,00	7.317.921.630,00	41,25	7.654.008.183,00	41,50	7.466.777.768,00	41,75	7.568.615.638,00
		Indeks Penyelenggaraan Trantibuminmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	Persentase	40,97		41,00		41,25		41,50		41,75	
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					6.486.000.501,00		8.853.764.890,00		9.762.024.549,00		8.998.045.578,00		9.256.540.919,00
	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	Unit	1	6.196.000.501,00	1	7.239.921.630,00	1	7.553.340.608,00	1	7.353.580.239,00	1	7.438.547.234,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	Dokumen	1		1		1		1			
		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Dokumen	0		0		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Transtibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	Dokumen	0		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	Dokumen	3		2		2		1		1	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	laporan	4		4		4		4		4	
		Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	laporan	1		1		1		1		1	
		Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	laporan	4		4		4		4		4	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN											
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					0,00		82.000.000,00			122.667.576,00		124.395.065,00		132.068.406,00
	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	Dokumen	3	0,00	2	82.000.000,00	2		122.667.576,00	1	124.395.065,00	1	132.068.406,00
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi					500,00		182.000.000,00			222.667.576,00		215.197.529,00		232.068.404,00
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	Dokumen	1	500,00	1	182.000.000,00	1		222.667.576,00	1	215.197.529,00	1	232.068.404,00
1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					20.000.000,00		72.000.000,00			122.667.576,00		115.197.529,00		127.068.404,00
	Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	Laporan	1	20.000.000,00	1	72.000.000,00	1		122.667.576,00	1	115.197.529,00	1	127.068.404,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					6.176.000.000,00		6.332.000.000,00		6.372.667.576,00		6.356.000.000,00		6.382.068.404,00
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	Laporan	4	6.176.000.000,00	4	6.332.000.000,00	4	6.372.667.576,00	4	6.356.000.000,00	4	6.382.068.404,00
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi					0,00		82.000.000,00		122.667.576,00		115.197.529,00		132.068.404,00
	Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	Laporan	4	0,00	4	82.000.000,00	4	122.667.576,00	4	115.197.529,00	4	132.068.404,00
1.05.02.1.01.0025 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					0,00		323.921.638,00		176.667.576,00		209.197.529,00		211.068.404,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	1	323.921.638,00	1	176.667.576,00	1	209.197.529,00	1	211.068.404,00
1.05.02.1.01.0026 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota					0,00		105.999.992,00		76.667.576,00		59.197.529,00		61.068.404,00
	Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	0	105.999.992,00	1	76.667.576,00	1	59.197.529,00	1	61.068.404,00
1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum					1,00		60.000.000,00		336.667.576,00		159.197.529,00		161.068.404,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia (Unit)	Unit	1	1,00	1	60.000.000,00	1	336.667.576,00	1	159.197.529,00	1	161.068.404,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibusranmas	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Laporan	4	45.000.000,00	4	78.000.000,00	4	100.667.575,00	4	113.197.529,00	4	130.068.404,00
1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					45.000.000,00		78.000.000,00		100.667.575,00		113.197.529,00		130.068.404,00
	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Laporan	4	45.000.000,00	4	78.000.000,00	4	100.667.575,00	4	113.197.529,00	4	130.068.404,00
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Persentase	42,85	150.000.000,00	43,00	767.921.630,00	43,30	1.054.008.183,00	43,60	714.490.042,00	43,80	868.615.638,00
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	Persentase	42,85		43,00		43,30		43,60		43,80	
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					6.486.000.501,00		8.853.764.890,00		9.762.024.549,00		8.998.045.578,00		9.256.540.919,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Keterteraman dan Keterlibatan Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	Laporan	1	150.000.000,00	1	767.921.630,00	1	1.054.008.183,00	1	714.490.042,00	1	868.615.638,00
		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	65		70		80		100		150	
		Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia (Unit)	Unit	0				2		2		2	
		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Dokumen	1		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	Dokumen	1		1		1		1		1	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Orang	0		70		70		70		70	
1.05.02.1.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP					30.000.000,00		52.500.000,00		65.000.000,00		77.500.000,00		90.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	Dokumen	1	30.000.000,00	1	52.500.000,00	1	65.000.000,00	1	77.500.000,00	1	90.000.000,00
1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi					30.000.000,00		52.500.000,00		65.000.000,00		77.500.000,00		90.000.000,00
	Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Dokumen	1	30.000.000,00	1	52.500.000,00	1	65.000.000,00	1	77.500.000,00	1	90.000.000,00
1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat					90.000.000,00		122.500.000,00		135.000.000,00		147.500.000,00		160.000.000,00
	Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	Laporan	1	90.000.000,00	1	122.500.000,00	1	135.000.000,00	1	147.500.000,00	1	160.000.000,00
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Orang	0	0,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN											
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum					0,00		317.921.630,00			554.008.183,00		164.490.042,00		268.615.638,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia (Unit)	Unit	0	0,00		317.921.630,00	2		554.008.183,00	2	164.490.042,00	2	268.615.638,00
1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat					0,00		122.500.000,00			135.000.000,00		147.500.000,00		160.000.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	65	0,00	70	122.500.000,00	80		135.000.000,00	100	147.500.000,00	150	160.000.000,00
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					628.000.000,00		1.748.843.260,00			2.752.102.917,00		1.682.699.399,00		1.690.231.276,00
	cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Persentase	60	140.000.000,00	65	1.260.843.260,00	70		1.092.008.183,00	75	827.921.631,00	80	833.615.638,00
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	Persentase	6		7		8			9		10	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					548.000.000,00		1.726.843.260,00		2.649.816.371,00		1.494.699.399,00		1.505.231.276,00
	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	Dokumen	1	40.000.000,00	1	278.000.000,00	1	537.508.473,00	1	553.921.631,00	1	543.615.638,00
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Laporan)	Laporan	0		0		7		7		7	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi (Kabupaten/Kota)	Kabupaten/ Kota	0		0		7		7		7	
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	Dokumen	1		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1		1		1		1		1	
		Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	Dokumen	1		1		1		1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	Dokumen	0				1		1		1	
1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran					0,00		27.000.000,00		30.324.341,00		44.865.203,00		46.076.954,00
	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	Dokumen	1	0,00	1	27.000.000,00	1	30.324.341,00	1	44.865.203,00	1	46.076.954,00
1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					40.000.000,00		70.000.000,00		232.837.790,00		99.865.203,00		97.076.954,00
	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	Dokumen	1	40.000.000,00	1	70.000.000,00	1	232.837.790,00	1	99.865.203,00	1	97.076.954,00
1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran					0,00		57.000.000,00		60.324.341,00		74.865.203,00		76.076.954,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	Dokumen	1	0,00	1	57.000.000,00	1	60.324.341,00	1	74.865.203,00	1	76.076.954,00
1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					0,00		17.000.000,00		20.924.631,00		69.865.203,00		67.076.954,00
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	Dokumen	0	0,00		17.000.000,00	1	20.924.631,00	1	69.865.203,00	1	67.076.954,00
1.05.04.1.01.0025 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi					0,00		0,00		30.924.341,00		49.865.209,00		47.076.954,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi (Kabupaten/Kota)	Kabupaten/ Kota	0	0,00	0	0,00	7	30.924.341,00	7	49.865.209,00	7	47.076.954,00
1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran					0,00		80.000.000,00		90.924.341,00		109.865.204,00		107.076.954,00
	Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	0,00	1	80.000.000,00	1	90.924.341,00	1	109.865.204,00	1	107.076.954,00
1.05.04.1.01.0029 - Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran					0,00		27.000.000,00		30.324.347,00		44.865.203,00		46.076.960,00
	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	0,00	1	27.000.000,00	1	30.324.347,00	1	44.865.203,00	1	46.076.960,00
1.05.04.1.01.0033 - Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					0,00		0,00		40.924.341,00		59.865.203,00		57.076.954,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitas Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitas Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Laporan)	Laporan	0	0,00	0	0,00	7	40.924.341,00	7	59.865.203,00	7	57.076.954,00
	Jumlah spras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	Unit	5	60.000.000,00	7	907.500.000,00	9	466.500.000,00	10	183.000.000,00	12	190.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	2		2		2		2		2	
1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					60.000.000,00		850.000.000,00		401.500.000,00		106.500.000,00		110.000.000,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	Unit	5	60.000.000,00	7	850.000.000,00	9	401.500.000,00	10	106.500.000,00	12	110.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.0032 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota					0,00		57.500.000,00		65.000.000,00		76.500.000,00		80.000.000,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	2	0,00	2	57.500.000,00	2	65.000.000,00	2	76.500.000,00	2	80.000.000,00
	Jumlah dokumen standarisasi spras pemadam kebakaran dan pertolongan	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Dokumen)	Dokumen	1	40.000.000,00	1	75.343.260,00	1	87.999.710,00	1	91.000.000,00	11	100.000.000,00
1.05.04.1.01.0006 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					40.000.000,00		75.343.260,00		87.999.710,00		91.000.000,00		100.000.000,00
	Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Dokumen)	Dokumen	1	40.000.000,00	1	75.343.260,00	1	87.999.710,00	1	91.000.000,00	11	100.000.000,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan keterlibatan umum (%)	Persentase	6	488.000.000,00	7	488.000.000,00	8	1.660.094.734,00	9	854.777.768,00	10	856.615.638,00
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	Persentase	6		7		8		9		10	
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					548.000.000,00		1.726.843.260,00		2.649.816.371,00		1.494.699.399,00		1.505.231.276,00
	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	13	408.000.000,00	13	327.600.000,00	13	788.400.005,00	13	409.202.768,00	13	434.553.138,00
		Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)	Orang	60		60		60		60		60	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	Orang	0		1		0		1		0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	Laporan	0		1		1		1		1	
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan kompetensi (Orang)	Orang	0		5		5		5		5	
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	Laporan	0		5		5		5		5	
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	Dokumen	0		0		1		0		0	
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	Dokumen	0		1		1		1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	Dokumen	0		1		0		1		0	
		Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	Laporan	0		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	0		1		1		1		1	
		Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	Orang	0		50		50		50		50	
1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota					135.000.000,00		54.100.000,00		149.100.000,00		82.361.064,00		82.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)										
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)	Orang	60	135.000.000,00	60	54.100.000,00	60	149.100.000,00	60	82.361.064,00	60	82.000.000,00
1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran					0,00		7.100.000,00		47.100.000,00		7.461.064,00		15.600.000,00
	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	0	7.100.000,00	1	47.100.000,00	0	7.461.064,00	0	15.600.000,00
1.05.04.1.01.0015 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran					0,00		5.000.000,00		45.000.000,00		5.361.064,00		5.153.138,00
	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	1	5.000.000,00	1	45.000.000,00	1	5.361.064,00	1	5.153.138,00
1.05.04.1.01.0020 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota					0,00		5.000.000,00		45.000.000,00		5.361.064,00		5.000.000,00
	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	Laporan	0	0,00	1	5.000.000,00	1	45.000.000,00	1	5.361.064,00	1	5.000.000,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota					0,00		5.000.000,00		45.000.000,00		5.361.064,00		5.000.000,00
	Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	Laporan	0	0,00	5	5.000.000,00	5	45.000.000,00	5	5.361.064,00	5	5.000.000,00
1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota					273.000.000,00		216.200.000,00		273.000.000,00		273.361.064,00		273.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	13	273.000.000,00	13	216.200.000,00	13	273.000.000,00	13	273.361.064,00	13	273.000.000,00
1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					0,00		12.100.000,00		42.100.000,00		7.461.064,00		15.600.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	1	12.100.000,00	0	42.100.000,00	1	7.461.064,00	0	15.600.000,00
1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.275.320,00		5.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.275.320,00	1	5.000.000,00
1.05.04.1.01.0036 - Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota					0,00		4.000.000,00		82.100.000,00		3.100.000,00		10.600.000,00
	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan kompetensi (Orang)	Orang	0	0,00	5	4.000.000,00	5	82.100.000,00	5	3.100.000,00	5	10.600.000,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.0037 - Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota					0,00		10.100.000,00		51.000.005,00		10.100.000,00		13.600.000,00
	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	Orang	0	0,00	1	10.100.000,00	0	51.000.005,00	1	10.100.000,00	0	13.600.000,00
1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi					0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	Laporan	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
1.05.04.1.01.0039 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran					0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	Orang	0	0,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00
	Jumlah dokumen kerjasama antar daerah/antar lembaga	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Laporan)	Laporan	1	0,00	1	138.400.000,00	0	769.408.183,00	1	257.575.000,00	0	237.062.500,00
		Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	Dokumen	0				1		1		1	
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	Dokumen	1				1		1		1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	Dokumen	0				1		1		1	
		Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	Dokumen	0				0		1		0	

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen					1		1		1	
1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran					0,00		35.680.000,00		91.462.500,00		32.475.000,00		35.187.500,00
	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	Dokumen	1	0,00	1	35.680.000,00	1	91.462.500,00	1	32.475.000,00	1	35.187.500,00
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					0,00		42.840.000,00		112.312.500,00		49.275.000,00		45.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	1	42.840.000,00		112.312.500,00	1	49.275.000,00		45.000.000,00
1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan					0,00		5.000.000,00		140.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelamatan (RISPKP)													
	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	1	5.000.000,00	1	140.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran					0,00		9.940.000,00		117.312.500,00		40.825.000,00		25.937.500,00
	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	0	9.940.000,00	1	117.312.500,00	0	40.825.000,00	0	25.937.500,00
1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran					0,00		0,00		201.008.183,00		50.000.000,00		50.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen		0,00		0,00	1	201.008.183,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.05.04.1.01.0033 - Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan					0,00		44.940.000,00		107.312.500,00		45.000.000,00		40.937.500,00

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelamatan Non Kebakaran													
	Tersedianya Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitas Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitas Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Laporan)	Laporan	1	0,00	1	44.940.000,00	0	107.312.500,00	1	45.000.000,00	0	40.937.500,00
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					80.000.000,00		22.000.000,00		102.286.546,00		188.000.000,00		185.000.000,00
	Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	0	80.000.000,00	1	22.000.000,00	1	102.286.546,00	1	188.000.000,00	1	185.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	Laporan	1		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	Laporan	0		1		1		1		1	
		Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	0		1		1		1		1	
		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran (Laporan)	Laporan	0		1		1		1		1	
1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					0,00		5.000.000,00		30.000.000,00		30.600.000,00		30.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	Laporan	0	0,00	1	5.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.600.000,00	1	30.000.000,00
1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		100.600.000,00		100.000.000,00
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran (Laporan)	Laporan	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	100.600.000,00	1	100.000.000,00
1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					80.000.000,00		5.000.000,00		40.000.000,00		40.600.000,00		40.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	Laporan	1	80.000.000,00	1	5.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.600.000,00	1	40.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)		(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.600.000,00		5.000.000,00
	Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.600.000,00	1	5.000.000,00
1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota					0,00		2.000.000,00		22.286.546,00		10.600.000,00		10.000.000,00
	Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	0	0,00	1	2.000.000,00	1	22.286.546,00	1	10.600.000,00	1	10.000.000,00



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 . Selain itu, kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2030. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja SATPOL PP yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2026-2030

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Indikator Kinerja Satpol PP	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPD
						2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Predikat RB Perangkat Daerah (Satpol PP)	Nilai Raport Kinerja Perangkat Daerah	50	63	67	70	70	70	70
2	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Meningkatkan aspek kebebasan dalam demokrasi	Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	42,48	49,11	49,30	49,75	50	50,05	50,05
				persentase penyelenggaraan trantibumlinmas	40,97	43,68	44,05	44,50	44,78	45,14	45,14
				Persentase cakupan perlindungan masyarakat	42,86	42,93	43,10	43,25	43,40	43,60	43,60
				Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	36,53	36,80	36,90	37,00	37,10	37,15	37,15
				cakupan penyelenggaraan informasi dan edukasi rawan kebakaran	N/A	6	7	8	9	10	10
				cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	N/A	60	65	70	75	80	80

*Keterangan : Sumber Data Diolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ** Data Estimasi*

Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026-2030 yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun dengan melakukan berbagai pertimbangan dari aspek-aspek yang menyangkut kebutuhan dan masalah-masalah yang mempengaruhinya. Komitmen dan arah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rentang waktu 4 (empat) tahun ke depan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini merupakan pedoman pelaksanaan berbagai program kerja sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyosong periode lima tahun ke depan (2026 - 2030)

Keberhasilan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembinaan, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan. Diseminasi renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai



kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur dengan demikian, seluruh kegiatan Satpol PP yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

Dengan dirumuskan Perubahan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini, semua kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam satuan Rencana Kinerja (Renja), sedangkan pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Paling utama dokumen perubahan Renstra ini akan meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan tentunya diharapkan akan meningkatkan nilai dan predikat SAKIP Perangkat Daerah.

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Dr. (HC). HIDAYAT ARSANI, SE



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,
Jl. Pulau Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
Pangkalpinang Tel: (0717) 4255015